

## KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

## SUB KATEGORI

Transportasi Darat

## NAMA INDIKATOR

Panjang Jalan Kabupaten Dengan Permukaan Tanah

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Panjang Jalan Kabupaten dengan Permukaan Tanah** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak prasarana transportasi darat berupa jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten yang permukaannya dilapisi oleh suatu bahan yang tersusun dari mineral dan bahan organik.
- **Panjang** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung.
- **Jalan Kabupaten** merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- **Kabupaten** adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- **Permukaan** adalah bidang rata di atas suatu benda (air, laut, bumi, dan sebagainya).
- **Tanah** adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.

## RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## UKURAN

Km

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui panjang jalan kabupaten dengan permukaan tanah di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin panjang jalan kabupaten dengan permukaan tanah di suatu wilayah maka akan mengganggu sistem transportasi di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

## **DOKUMEN**

SIPD

